BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Bank Perkreditan Rakyat

2.1.1.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Menurut UU No. 10 pasal 1 ayat 2 tahun 1998 tentang perbankan, menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat ditujukan untuk melayani usaha kecil dan masyarakat di daerah. Bank Perkreditan Rakyat berbentuk hukum Perseorangan Terbatas, Perusahaan Daerah atau koperasi.

Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang memiliki kegiatan usaha terbatas dengan transaksi yang sederhana, meliputi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan penyaluran kredit. Keterbatasan ini diberikan kepada Bank Perkreditan Rakyat terkait dengan tujuan pelayanan utama Bank Perkreditan Rakyat kepada usaha mikro kecil dan menengah serta masyarakat sekitar.

Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu pendukung perkembangan perekonomian Indonesia, terutama untuk kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah. Peranan Bank Perkreditan Rakyat dalam pemberian kredit bagi usaha

mikro, kecil dan menengah dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan pemerataan kesempatan berusaha di Indonesia.

2.1.1.2 Pengaturan dan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat

Sebagai salah satu jenis bank maka pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dilakukan oleh Bank Indonesia yang tertuang dalam UU No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Kewenangan pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat oleh Bank Indonesia meliputi kewenangan memberi izin (*right to lincense*), kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*).

Pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat oleh Bank Indonesia diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi Bank Perkreditan Rakyat sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik operasional Bank Perkreditan Rakyat namun tetap menerapkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) agar tercipta sistem perbankan yang sehat.

2.1.1.3 Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan usaha yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat menurut Kasmir (2003 : 42) meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan atau dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.

3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito.

Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat menurut Kasmir (2003:50) adalah :

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia).
3. Melakukan penyertaan modal.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha di luar kegiatan usaha yang di maksud sebelumnya.

2.1.1.4 Sumber Dana Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Kasmir (2003:52) sumber dana bank atau dari mana bank mendapatkan dana untuk keperluan operasionalnya dibedakan menjadi 3 sumber, yaitu dana yang berasal dari modal sendiri, pinjaman dan masyarakat.

1. Dana yang berasal dari modal sendiri Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak pertama yaitu dana yang berasal dari dalam bank, baik pemegang saham maupun sumber lain.
2. Dana yang berasal dari pinjaman Sumber dana ini sering disebut dana pihak kedua yaitu sumber dana yang berasal dari pinjaman bank lain maupun lembaga keuangan lain kepada bank.

3. Dana yang berasal dari masyarakat Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak ketiga yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.

2.1.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan dalam satu periode waktu yang telah berlalu (*Past Performance*). Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.

Menurut Zaki Baridwan (2010: 17), laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama dua tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan menurut Munawir (2004: 2), laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Sejalan dengan Munawir, Sundjaja dan Barlian (2001: 47) juga memberikan penjelasan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan.

Laporan keuangan perusahaan terdiri dari beberapa jenis yang menyatakan tentang kegiatan perusahaan. Jenis-jenis tersebut akan menyatakan tentang kondisi dari perusahaan tersebut.

Menurut Kieso dan Weygandt, (2007: 5) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo menyebutkan tentang jenis-jenis laporan keuangan adalah sebagai berikut :

> "Laporan keuangan yang sering disajikan adalah neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham".

Teori di atas menjabarkan jenis-jenis laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal atau laba ditahan, dimana setiap laporan memiliki fungsi yang berbeda-beda namun memiliki keterkaitan satu sama lain.

1. Neraca

   Neraca merupakan laporan posisi keuangan yang menggambarkan asset, kewajiban, dan modal suatu perusahaan dalam suatu tanggal tertentu. Melalui laporan ini pengguna laporan dapat mengetahui informasi mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas pemilik dalam sumber daya bersih. Dengan demikian, neraca dapat membantu meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas dimasa depan.

2. Laporan Laba Rugi

   Laporan Laba Rugi merupakan laporan operasi perusahaan selama periode akuntansi yang menyajikan seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil, laba atau rugi perusahaan. Laporan laba rugi membantu pemakai perusahaan

dalam beroperasi, memprediksikan operasi perusahaan dimasa yang akan datang.

3. Laporan Modal atau Laba Ditahan

   Laporan Modal atau Laba Ditahan menyajikan peningkatan dan penurunan aktiva bersih perusahaan atau kekayaan perusahaan selama periode yang bersangkutan termasuk keputusan atas kebijakan direksi terhadap para pemilik modal.

4. Laporan Arus Kas

   Laporan Arus Kas menyajikan informasi yang penerimaan kas dan penggunaan kas suatu perusahaan selama periode akuntansi. Ikthisar laporan ini terdiri dari laporan arus kas dari aktivitas operasi, laporan arus kas dari aktivitas investasi dan laporan arus kas dari aktivitas pendana (Keuangan).

Laporan Keuangan dalam perusahaan bank sama saja dengan laporan keuangan perusahaan lainnya. Laporan Keuangan Perbankan menurut Ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Neraca Bank

   Sisi aktiva dalam neraca bank menggambarkan pola pengalokasian dana bank yang mencerminkan posisi kekayaan yang merupakan hasil penggunaan dana bank dalam berbagai bentuk. Penggunaan dana bank dilakukan berdasarkan prinsip prioritas. Disamping itu kegiatan pengalokasian dana tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Sentral sebagai otoritas moneter yang mengatur dan mengawasi bank.

   Sisi pasiva dalam neraca bank menggambarkan kewajiban bank yang berupa klaim pihak ketiga atau pihak lainnya atas kekayaan bank yang

dinyatakan dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposito berjangka dan instrumen-instrumen utang atau kewajiban bank lainnya. Selain itu modal bank menggambarkan nilai buku pemilik saham bank. Sisi pasiva mencerminkan kegiatan penghimpunan dana yang berasal dari berbagai sumber. Dana bank yang pada dasarnya berasal dari masyarakat atau pihak ketiga dan modal bank itu sendiri (Ekuitas).

2. Laporan Laba Rugi Bank

Laporan laba/rugi bank (*Profit and Loss Statement*) atau lebih dikenal juga dengan *Income Statement* dari suatu Bank umum adalah suatu laporan keuangan bank yang menggambarkan pendapatan dan biaya operasional dan nonoperasional bank serta keuntungan bersih bank untuk suatu periode tertentu.

3. Laporan Komitmen dan Kontijensi

Laporan Komitmen dan Kontijensi wajib disusun secara sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi komitmen dan kontijensi, baik yang bersifat tagihan maupun kewajiban pada tanggal laporan.

Komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan (*Irrecovable*) secara sepihak, dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi, seperti komitmen kredit, komitmen penjualan atau pembelian aktiva bank dengan syarat *Repurchase Aggrement* (Repo), serta komitmen penyediaan fasilitas perbankan lainnya.

Kontijensi adalah tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

4. Laporan Arus Kas

   Laporan Arus Kas pada bank disusun berdasarkan konsep Kas (*Cash Concept*) selama periode laporan. Laporan ini harus menunjukkan semua aspek penting dari kegiatan bank, tanpa memperhatikan pengaruh langsung sebuah transaksi terhadap Kas.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

   Baik perusahaan maupun bank wajib membuat Catatan Atas Laporan Keuangan. Pada bank, catatan ini memuat posisi devisa neto menurut jenis mata uang serta aktivitas-aktivitas lain seperti kegiatan wali amanat, penitipan harta (*Custodianship*), dan penyaluran kredit kelolaan.

2.1.3 Likuiditas

2.1.3.1 Pengertian Likuiditas

Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran (alat-alat likuid) yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu merupakan “kekuatan membayar” dari perusahaan yang bersangkutan. Suatu perusahaan yang mempunyai “kekuatan membayar” belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finasialnya yang segera harus dipenuhi,

atau dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu mempunyai “kemampuan membayar” (Bambang Riyanto, 2001: 25).

Jadi perusahaan dapat menjaga likuiditasnya apabila memiliki alat-alat likuid yang merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang bersangkutan dan alat-alat likuid tersebut harus memiliki kemampuan membayar, baru perusahaan dapat memenuhi kewajiban finansialnya.

Adapun beberapa pengertian mengenai likuiditas, yaitu sebagai berikut:

Menurut Lukman Dendawijaya (2005 : 114) adalah sebagai berikut :

“Likuiditas bank adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudahh jatuh tempo”.

Menurut Bambang Riyanto (2001: 25) adalah:

“Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi”.

Adapun menurut Veithzal Rivai (2013:145) adalah sebagai berikut:

“Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat”.

Sedangkan Lukman Syamsudin (2004: 41) mengemukakan bahwa:

“Likuiditas adalah merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia”.

Lebih lanjut mengenai likuiditas Kasmir (2003: 48) mengemukakan bahwa:

"Likuiditas menggambarkan tingkat kemampuan sebuah bank memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat ditagih dan permintaan penarikan dana dari para deposannya",

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang harus segera dibayar tepat pada waktunya dengan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan.

2.1.3.2 Rasio Likuiditas

Tingkat likuiditas suatu perusahaan dapat diketahui dengan menghitung rasio likuiditas. Lukman Dendawijaya (2005 : 116) mengungkapkan bahwa analisa rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dan kewajiban yang sudah jatuh tempo. Beberapa rasio likuiditas yang sering dipergunakan dalam menilai kinerja suatu bank antara lain sebagai berikut :

1. *Reserve Requirement*

   Reserve Requirement atau dikenal juga dengan likuiditas wajib minimum adalah suatu simpanan minimum yang wajib di pelihara dalam bentuk giro di BI bagi semua bank. Untuk mengetahui besarnya *reserve requirement* dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Reserve\ Requirement = \frac{\text{Jumlah Alat Likuid}}{\text{Jumlah Dana Pihak Ketiga}} x100\%$$

2. *Cash Ratio*

   Kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat-alat likuid yang dimilikinya.

$$Cash\ Ratio = \frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Pinjaman yang harus segera dibayar}} x100\%$$

3. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

   Loan To Deposit Ratio adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank dan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Loan\ to\ Deposit\ Ratio\ (LDR) = \frac{\text{Total Kredit Yang Diberikan}}{\text{Total DPK}} x100\%$$

4. *Loan to Asset Ratio*

   Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank

$$Loan\ to\ Asset\ Ratio = \frac{\text{Jumlah Kredit yang diberikan}}{\text{Jumlah Asset}} x100\%$$

5. Rasio Kewajiban Bersih *Call Money*

   Rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban bersih *call money* terhadap aktiva lancar atau aktiva yang paling likuid dari bank.

$$\text{Rasio Kewajiban Bersih Call Money} = \frac{\text{Kewajiban Bersih Call Money}}{\text{Aktiva Lancar}} x100\%$$

   Untuk keperluan pembatasan penelitian maka penulis menggunakan metode *Cash Ratio.*

   Kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat-alat likuid yang dimilikinya.

$$Cash\ Ratio = \frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Pinjaman yang harus segera dibayar}} x100\%$$

2.1.4. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penulisan penelitian ini adalah :

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Tingkat Likuiditas Dengan Metode Current Ratio dan Cash Ratio pada PT. Bank Jabar Banten KCP Cicadas Cabang Suci Bandung Lasma Paska N Silalahi (2010)	Tingkat likuiditas menunjukan adanya perkembangan tingkat ikuiditas pada bank dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan, namun untuk tahun 2006 dan 2008 aktiva lancar cenderung mengalami penurunan.	Menganalisis likuiditas bank	Metode yang digunakan penelitian tersebut adalah Current ratio dan cash ratio
2	Analisis Tingkat Likuiditas Pada Bank Pembangunan Daerah (Studi kasus BPD Sulselbar, BPD Sulut, BPD Sumut, BPD Riau, BPD DKI, BPD Jabar, BPD Jatim, BPD Bali, BPD Kaltim, BPD Kalbar, dan BPD Papua) Muhammad Natsir (2012)	Secara umum likuiditas bank BPD itu baik, namum ada beberapa BPD yang menjadi perhatian, BPD ini harus meningkatkan manajemen dana sehingga kedepannya tidak mengalami kesulitan likuiditas.	Menganalisis likuiditas bank	Metode yang digunakan penelitian tersebut yaitu LAR, LDR.
4	Analisis Rasio Likuiditas Pada Bank PT. Bank BRI TBK	Tingkat likuiditas Bank berdasarkan analisis perhitungan quick	Menganalisis likuiditas bank	Metode yang digunakan penelitian

	Irman Budiman (2014)	ratio dinilai masih rendah		tersebut yaitu Quick Ratio
5	Analisis Tingkat Likuiditas pada PT. Bank BRI KCP Medan Rahma Siregar (2011)	Tingkat likuiditas menunjukan adanya perkembangan dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan penurunan.	Menganalisis likuiditas bank	Metode yang digunakan penelitian tersebut yaitu Current Ratio, Quick Ratio, dan Cash Ratio.

2.2 Kerangka Pemikiran

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo. Likuiditas merupakan salah satu faktor yang diduga kuat mempengaruhi kebijakan deviden. Semakin tinggi likuiditas perusahaan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam membayar deviden.

Menurut Wild, Subranyaman dan Helsey (2005:9) "likuiditas (*liquidity)* merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya. Likuiditas bergantung pada arus kas perusahaan dan komponen aktiva lancar dan kewajiban lancarnya".

Sedangkan menurut Syamsuddin (2007:41) "likuiditas tidak hanya berkenaan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga berkenaan dengan kemampuannya untuk mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas".

Kelebihan dan kekurangan likuiditas sama-sama memiliki dampak kepada bank. Jika bank terlalu konservatif mengelola likuiditas dalam pengertian terlalu

besar memelihara likuiditas akan mengakibatkan profitabilitas bank menjadi rendah walaupun dari sisi *liquidity shortage risk* akan aman. Sebaliknya jika bank menganut pengelolaan likuiditas yang agresif maka cenderung akan dekat dengan *liquidity shortage risk* akan tetapi memiliki kesempatan untuk memperoleh profit yang tinggi. *Shortage liquidity risk* akan menyebabkan dampak serius terhadap *business contuinity dan business sustainibility*.

Melalui pengelolaan likuiditas yang baik bank dapat memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa mereka dapat menarik dananya sewaktu waktu pada saat jatuh tempo,untuk itulah analisis likuiditas sangat penting dan bank harus dapat mempertahankan likuiditasnya.

Menurut Lukman Dendawijaya (2005 : 114-116) analisis rasio likuiditas adalah “analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo”.

Sedangkan *cash ratio* menurut Lukman Dendawijaya (2005 : 114-116) adalah "rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun bank yang harus segera dibayar”.

Sedangkan pengertian *Cash Ratio* menurut Mumduh M.Hanapi dan Abdul Halim (2003:204) , yaitu :

“Cash Ratio yaitu perbandingan aliran kas dalam suatu periode dibagi rata-rata hutang lancar pada periode tersebut ”.

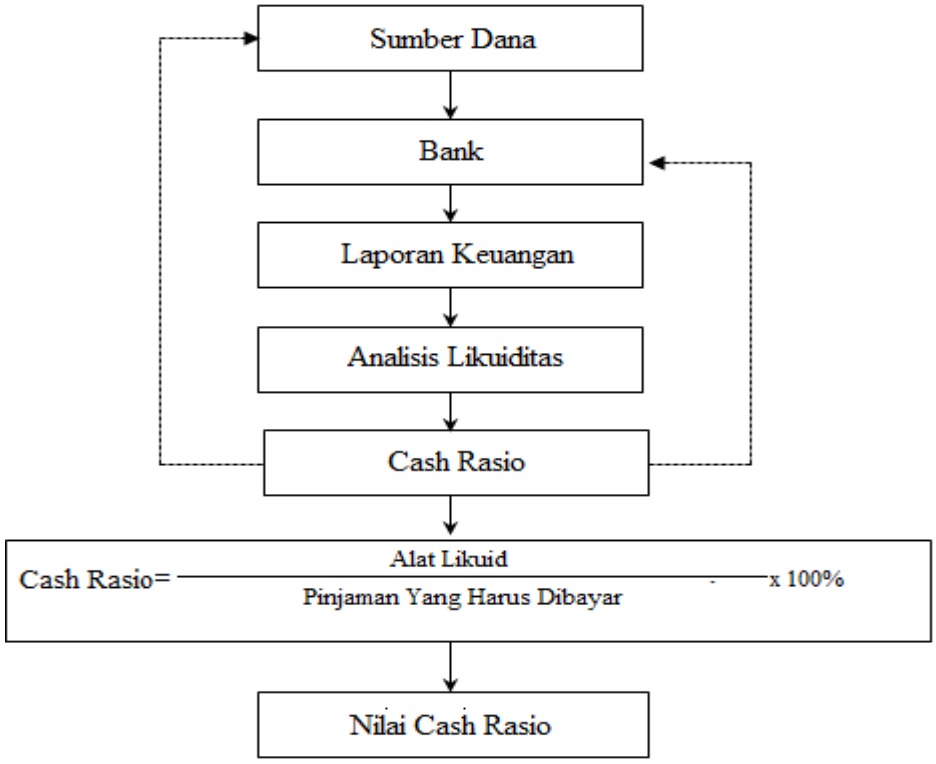
Cash Ratio adalah alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang di himpun bank yang segera di bayar. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat di tarik dengan

menggunakan alat likuid yang di milikinya. Menurut ketentuan Bank Indonesia, alat likuid terdiri atas kas di tambah dengan rekening giro bank yang di simpan pada BI atau bank lain. Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan.

Cash Ratio digunakan sebagai proksi likuiditas dalam penelitian ini karena *cash ratio* adalah rasio yang paling umum dan banyak digunakan untuk mengukur likuiditas bank.

$$Cash\ Ratio = \frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Pinjaman yang harus segera dibayar}} x100\%$$

Alat likuid adalah uang tunai dan asset lain yang dapat segera diuangkan sehingga operasional bank tetap berjalan yaitu kas.



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

Setelah dinilai kemudian di analisis dengan memperhatikan faktor lain yang mempengaruhi pada akhirnya diperoleh angka yang dapat menentukan tingkat likuiditas menurut SK DIR. No. 30/12 Kep/Dir dan SK BI No 30/30 UPPB Tanggal 30 April 1997 Tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank Tentang Likuiditas.

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Likuiditas

Nilai	Kriteria
≥ 4,05%	Sehat
≥ 3,30% - 4,00%	Cukup Sehat
≥ 2,55% - 3,30%	Kurang Sehat
≤ 2,55%	Tidak Sehat

Sumber : SK DIR. No. 30/12 Kep/Dir dan SK BI No.30/30 UPPB tanggal 30 April 1997